

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH

Agus Dharma, Ph.D.
Badan Bahasa

I. Pendahuluan

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 bahwa bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat penuturnya dipelihara oleh Negara. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 huruf n dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya. Berdasarkan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang itu, baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban bersama untuk memelihara dan menjaga kelestarian kekayaan budaya bangsa, yaitu bahasa daerah karena di dalam bahasa daerah itu terekam nilai-nilai budaya masyarakat daerah yang dapat menjadi sumber pengembangan budaya nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercirikan "bhineka tunggal ika", yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, secara tersurat mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk menghargai perbedaan, baik adat-istiadat, agama, dan bahasa. Dengan demikian penghargaan terhadap bahasa daerah yang beragam merupakan keharusan karena penghargaan terhadap bahasa daerah berarti penghargaan terhadap masyarakat pendukung bahasa daerah itu, sebaliknya sikap abai terhadap bahasa daerah sama artinya dengan mengabaikan keberadaan masyarakat pendukung bahasa itu.

Di Indonesia terdapat kurang lebih 746 bahasa daerah, enam puluh persen dari jumlah itu berada di wilayah Indonesia Timur, yaitu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kurang lebih 400 bahasa, Maluku dan Maluku Utara 132 bahasa, dan kurang lebih 40 bahasa ada di Nusa Tenggara Timur. Tiga puluh lima persen dari bahasa-bahasa daerah itu dikhawatirkan mengalami kepunahan pada 2010 (Pernyataan Wakil Presiden dalam *running tex* Metro TV, 21 Juli 2007). Kondisi ini tentu ditengarai oleh kurangnya minat generasi muda untuk bertutur dengan bahasa daerahnya karena adanya kecenderungan meninggalkan tempat kelahiran untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Jika kita abai terhadap kondisi kebahasaan yang sangat memprihatinkan ini berarti kita akan kehilangan sebagian kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai itu karena punahnya bahasa berarti punah pula kekayaan nilai budaya bangsa dan akhirnya hilang keberadaan (eksistensi) bangsa penutur bahasa daerah itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan segera untuk menyelamatkan dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah itu.

II. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Daerah

Masyarakat yang maju selalu berubah menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka selalu mencari informasi baru agar tidak ketinggalan zaman sehingga dapat berkompetisi dengan masyarakat lain, baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Namun, di tengah gencarnya untuk selalu memodernkan diri itu mereka juga dituntut untuk selalu sadar akan kekayaan budayanya, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah selain merupakan kekayaan budaya juga merupakan kekayaan intelektual, yaitu sebagai hasil kreativitas moyang kita dalam menghadapi tantangan alam, khususnya dalam berkomunikasi.

Bahasa daerah sebagai kekayaan intelektual itu cenderung kurang disadari oleh masyarakat penutur bahasa itu, khususnya generasi mudanya, sehingga ketika ada alat komunikasi lain yang oleh generasi muda dinilai lebih efektif, bahasa daerah itu sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Banyaknya pemuda yang datang ke kota merupakan salah satu faktor penyebab terkendalanya pengembangan bahasa daerah itu karena mereka di tempat baru dengan anggota masyarakat yang beragam dituntut untuk menggunakan bahasa yang dapat memudahkan komunikasi antaranggota masyarakat yang baru itu. Di samping itu, tingkat mobilitas masyarakat juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bahasa daerah itu. Oleh karena itu, agar bahasa daerah tetap berkembang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan bahasa daerah itu.

2.1 Pengembangan

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum upaya pembinaan bahasa adalah pengembangan, yang meliputi penelitian berbagai aspek kebahasaan, inventarisasi, kodifikasi, dan dokumentasi.

a. Penelitian

Penelitian berbagai aspek kebahasaan yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana diperlukan untuk pengembangan korpus bahasa. Pengembangan korpus itu meliputi kodifikasi tata tulis atau ejaan, tata bahasa, penyusunan kamus, tata peristilahan, dan penyusunan buku ajar. Ejaan memudahkan penutur melambangkan bunyi-bunyi bahasa, menggabungkan, menyuku, dan menuliskannya. Adanya ejaan yang disepakati bersama memungkinkan komunikasi secara tertulis antaranggota penutur bahasa daerah dapat berjalan lancar dan terminimalkan kemungkinan salah tafsir selama berkomunikasi secara tulis.

Tata bahasa merupakan hal yang universal dalam bahasa. Tidak ada bahasa yang tidak mempunyai tata bahasa. Bahasa yang masih hidup dan diinginkan tetap hidup dan berkembang haruslah mempunyai tata bahasa yang sudah dibukukan. Mustahil bahasa yang ingin berkembang tanpa didukung tata bahasa yang sudah dikodifikasi.

Tata bahasa diperlukan untuk memudahkan masyarakat penutur belajar bahasa karena dengan tata bahasa dapat diketahui bagaimana membentuk kata, merangkai kata menjadi kalimat, bahkan merangkai kalimat menjadi paragraf secara benar. Di samping itu, tata bahasa yang sudah dibukukan juga merupakan bentuk dokumentasi yang dapat digunakan untuk melacak keberadaan bahasa di masa lalu tetapi juga untuk menghubungkan generasi masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Kamus minimal berisi informasi tentang kosakata dalam suatu bahasa dengan penjelasan makna dalam satu bahasa atau dua bahasa. Kamus besar berisi informasi tentang kosakata yang meliputi, kata, gabungan kata, peribahasa, dan aksara dalam satu bahasa. Kamus membantu masyarakat mengenali kekayaan kosakata daerahnya, ungkapan, peribahasa, bahkan dari kamus itu dapat dikenali secara sepintas nilai budaya daerah dan perkembangan kebudayaan nenek moyang. Dengan kata lain, kamus merupakan tanur informasi budaya suatu bangsa. Sudah barang tentu kamus sangat membantu seseorang mempelajari bahasa.

b. Inventarisasi

Inventarisasi ini dilakukan dengan pendataan kosakata dasar, kosakata budaya, ungkapan, peribahasa, kosakata lainnya, dan cerita rakyat. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kekayaan kosakata suatu bahasa, persebaran bahasa, keragaman bahasa, jumlah penutur bahasa itu, dan pembuatan peta bahasa. Oleh karena itu, inventarisasi harus dilakukan secara komprehensif mencakup beberapa titik pengamatan dalam satu wilayah.

c. Dokumentasi

Tata tulis, tata istilah, tata bahasa, kamus, peta bahasa, cerita rakyat yang sudah dibukukan merupakan bukti keberadaan suatu bahasa. Keberadaan dan kemudahan memperoleh bukti itu menunjukkan bahwa bahasa itu terpelihara dengan baik dan tingkat kepedulian pihak yang berkepentingan terhadap bahasa itu sangat tinggi.

2.2 Pembinaan

Pembinaan bahasa dapat dilakukan secara efektif jika unsur-unsur bahasa itu sudah terkodifikasi (Moeliono: 1985). Pembinaan tidak dapat dilaksanakan hanya dengan ingatan dan kebiasaan yang spekulatif. Adanya bahan yang dapat dijadikan acuan dalam pembinaan bahasa sangat membantu pelaksanaan kegiatan ini. Upaya pembinaan bahasa dapat dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui sekolah dan nonformal, yaitu melalui keluarga atau masyarakat.

a. Sekolah

Untuk dapat melaksanakan pembinaan bahasa di sekolah diperlukan kebijakan resmi dari pemerintah daerah untuk memasukkan mata pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum. Bagi daerah yang bahasa daerahnya tidak beragam kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan mudah, tetapi di daerah yang bahasa daerahnya beragam pelaksanaan itu sangat susah karena pemilihan salah satu bahasa akan meminggirkan bahasa daerah yang lain. Pembinaan bahasa daerah melalui jalur pendidikan formal ini merupakan salah satu indikator keberlangsungan hidup bahasa daerah itu. Namun, hal itu memerlukan biaya yang cukup besar karena harus tersedia tenaga pengajar dan kurikulum yang ditunjang oleh buku ajar yang memadai. Ketersediaan tenaga pengajar merupakan hal yang menjadi kendala pelaksanaan pembinaan melalui jalur sekolah ini. Tidak semua perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan bagi calon guru bahasa daerah atau tidak setiap fakultas sastra atau fakultas bahasa membuka jurusan bahasa daerah.

b. Keluarga dan Masyarakat

Tingginya pergerakan masyarakat memungkinkan mereka melakukan kawin campur antara dua etnis yang berlainan latar belakang budayanya. Penelitian penggunaan bahasa dalam keluarga kawin campur membuktikan bahwa generasi muda dari keluarga itu cenderung meninggalkan bahasa daerah kedua orang tua mereka (Lumintang:1990:362). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelestarian bahasa daerah itu sangat ditentukan oleh keluarga. Selama masih ada keluarga yang menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, bahasa daerah itu masih akan terus hidup.

Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan belajar bahasa yang paling efektif karena di dalam keluarga dan masyarakat mereka dapat mempraktikkan secara langsung apa yang mereka pelajari. Di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat anak sangat sedikit belajar teori, tetapi banyak sekali belajar praktik berbahasa. Karena berbahasa adalah keterampilan, hanya dengan praktik yang banyak, anak akan meningkatkan keterampilan berbahasanya.

Lingkungan masyarakat sebagai tempat anak mengenal lingkungan yang lebih luas juga merupakan tempat pembinaan bahasa daerah yang efektif. Di dalam masyarakat anak dapat mengikuti dan mengetahui kegiatan-kegiatan adat yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Oleh karena itu, banyaknya kegiatan yang merefleksikan bahasa daerah memungkinkan anak akrab dengan bahasa daerahnya.

III. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan

1. Bahasa daerah bukan sekadar kekayaan budaya tetapi juga merupakan kekayaan intelektual bangsa. Oleh karena itu, bahasa daerah harus dijaga keberlangsungan dan pengembangannya.
2. Pembinaan bahasa daerah harus dimulai dengan pengembangan korpus kebahasaan, yang meliputi pengembangan tata tulis, tata istilah, tata bahasa, kamus, dan bahan ajar.
3. Penelitian, inventarisasi, kodifikasi, dan dokumentasi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan bahasa daerah.
4. Keluarga harus menjadi benteng utama kelestarian bahasa daerah.
5. Kegiatan adat sebaiknya tetap menggunakan bahasa daerah.
6. Kegiatan kebahasaan pada umumnya merupakan kegiatan yang tidak berorientasi laba maka pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dengan mencadangkan anggaran yang memadai.
7. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah pemerintah perlu melibatkan ahli bahasa, ahli sastra, ahli budaya, dan masyarakat.
8. Jika perlu, pemerintah melibatkan organisasi lokal, nasional, dan internasional dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu.

Daftar Pustaka

- Hakim, Arief Rahman. 2007. . "The Role of Education in the Protection and Saving the Endangered Language." Makalah Kongres Bahasa-bahasa daerah di wilayah Timur, Ambon, 5—7 Agustus 2007.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 2006. "Memberdayakan Bahasa Ibu." Makalah Seminar Pelestarian Bahasa yang Terancam Punah, Pusat Bahasa, Sabtu 9 Desember 2006.
- Lauder, Multamia R.M.T. 2006. "Revitalisasi Bahasa Minoritas." Makalah Seminar Pelestarian Bahasa yang Terancam Punah, Pusat Bahasa, Sabtu 9 Desember 2006.
- Lumintang.1990. "Pola Pemakaian Bahasa dalam Perkawinan Campuran: Telaah terhadap Beberapa Keluarga Jawa—Sunda Karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan." (Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia).
- Moeliono. Anton. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan (Seri ILDEP).
- Alwi, Hasan (ed.) Makalah Kongres Bahasa-bahasa daerah di wilayah Timur, Ambon, 5—7 Agustus 2007.

2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Sugono, Dendy. 2007. "Kebijakan Bahasa daerah di Indonesia". Makalah Kongres Bahasa-bahasa daerah di wilayah Timur, Ambon, 5—7 Agustus 2007.

